

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

David H. Rosenbloom (dalam Harbani, 2010: 7) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah penerapan berbagai teori dan proses manajemen, politik, serta hukum untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam konteks legislatif dan eksekutif. Tujuan ini mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, baik secara keseluruhan maupun dalam aspek-aspek tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pelaku administrasi publik perlu memahami dinamika politik dan hukum yang ada, serta mampu menerapkan teori manajemen yang relevan.

Menurut Dwight Waldo (1984), administrasi publik dapat dipahami sebagai proses manajemen dan pengorganisasian sumber daya manusia serta peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Syafiie, 2010:24). Proses administrasi publik melibatkan berbagai elemen, termasuk koordinasi antar berbagai lembaga, komunikasi yang efektif, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional

Woodrow Wilson (1887) menyoroti signifikansi pemisahan antara politik dan administrasi. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal dalam sektor publik, administrasi harus dikelola dengan cara yang efisien dan profesional. Menurutnya, pemisahan ini penting agar keputusan administratif tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas publik yang lebih efektif. Dalam pandangannya, profesionalisme dalam administrasi

publik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang tinggi. Dengan demikian, Wilson menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya dan proses dengan baik, terlepas dari dinamika politik yang ada.

Manajemen publik sendiri adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik yang mendukung tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri dengan sumber daya yang ada pada organisasi (Ramto, 1997:14). Menurut Nor Ghofur (2014), manajemen publik dapat diartikan sebagai manajemen yang dilakukan oleh pemerintah. Ini berarti bahwa manajemen publik mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Manajemen publik tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada bagaimana pemerintah dapat berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nor Ghofur (2014) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah proses manajemen yang dijalankan oleh pemerintah, dengan fokus utama pada pengelolaan berbagai sumber daya serta peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi publik secara maksimal. Manajemen publik tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan material, tetapi juga mencakup pengorganisasian, perencanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik dengan cara yang efektif. Manajemen publik juga harus

mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja organisasi.

Dwight Waldo (1984) menjelaskan kinerja dalam administrasi publik dimana administrasi publik perlu memiliki kemampuan untuk mengelola kinerja secara efektif agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia berargumen bahwa keberhasilan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh cara di mana kinerja dikelola dan diukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi publik selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Selain itu, Dwight Waldo (1984) mencatat bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya.

Wittaker (1997) mendefinisikan kinerja sebagai suatu alat ukur dalam manajemen yang berfungsi untuk menilai sejauh mana seseorang dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Kinerja tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga mencakup proses, upaya, dan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kinerja dapat dianggap sebagai indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas individu atau tim dalam organisasi. Penilaian kinerja ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Agus Dwiyanto (1995: 45) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja atau tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, yaitu output, efisiensi, dan efektivitas. Konsep kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul Reformasi birokrasi Di Indonesia sendiri menjelaskan tentang penilaian kinerja yaitu suatu kegiatan dimana kegiatan ini dinilai penting karena bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi agar tercapai misi organisasi tersebut.

Moeheriono (2012:95) menjelaskan bahwa kinerja atau *performance* adalah representasi dari tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja ini tercermin dalam bagaimana sebuah organisasi mengimplementasikan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Di tingkat pusat, terdapat Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki kedudukan penting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara, serta Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian ini merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurut Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas utama dalam menyediakan dukungan teknis dan administratif, serta melakukan analisis terkait urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara. Tugas ini bertujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan secara efektif.

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Pemberian analisis hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Preserntasi analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Presentasi analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keprres mengenai grasi, amnesti, abolisi rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, Kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara 2023

Capaian sasaran strategis tahun 201-2023 Kementerian Sekretariat Negara dapat tercapai 100%, Kementerian Sekretariat Negara mampu memenuhi target dalam kinerjanya dalam pemberian analisis hukum dan perencanaan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat provinsi, terdapat Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai unsur pelayanan administrasi dan penyedia dukungan bagi tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, sementara secara administratif, Sekretariat bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 1.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2020-2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			T	R	T	R	T	R	Capaian
1.	Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	72	88,18	73	90,28	88,5	90,33	102,07
2.	Meningkatkan tatakelola organisasi Perangkat Daerah	Nilai kepuasan Masyarakat	72	83,63	73	85,37	74	87,75	118,58

Sumber: LKJIP Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai realisasi kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan, pada indikator indeks kepuasan atas kualitas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi Jawa Tengah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah capaian kinerja 102,07 yang telah melebihi target yang ditentukan yaitu 88,5

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, yang memiliki tujuan untuk mendukung adanya visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Rembang. Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yaitu Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang profesional, transparan dan akuntabilitas dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. Dan memiliki misi mewujudkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan; mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah secara cepat, tepat, tertib dan akurat untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD; dan mewujudkan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang profesional.

Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengawasi penggunaan sumber daya organisasi tetapi juga untuk mengukur efisiensi penggunaannya serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi kinerja merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan produktivitas staf. Bagian-bagian yang menunjukkan kinerja kurang optimal dapat diidentifikasi, memungkinkan pengembangan strategi untuk meningkatkannya.

Tabel 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2021-2023

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD	Indek Kepuasan Anggota DPRD	65	75,10	115	65	79,28	121	70	76,93	109

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan data perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja periode 2021-2023, bahwa terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu 109 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 121. Penurunan indeks kepuasan anggota DPRD ini menggambarkan penurunan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah kerja yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan Pasal 19. Dimana Bagian Umum dan Keuangan memiliki 3 Subbagian yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan DPRD
2. Subbagian Sarana dan Prasarana
3. Subbagian Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki tugas dan fungsi utama sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan 19 yaitu:

Tugas

1. Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara
2. Pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga
3. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan bidang tata usaha

Didalam pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terdapat persoalan. Dalam tugas Bagian Umum dan Keuangan pengembangan SDM aparatur sipil negara perlu adanya peningkatan hal ini bertujuan agar SDM aparatur sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki kompetensi lebih untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.

Sumber daya aparatur di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah menunjukkan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan di setiap divisi yang ada. Meskipun jumlah tenaga kerja yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh bagian, kenyataannya, 23endidik besar pegawai di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang masih berasal dari lulusan SLTA/SMA, dengan total mencapai 35 orang, perbedaan jenjang pendidikan tentu mempengaruhi didalam kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif sumber daya manusia sudah mencukupi, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kualitas 23endidikan pegawai yang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Tabel 1.4 Kompetensi Pegawai Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
S2	2
S1	3
SLTA/SMA	35

Sumber: Diolah Peneliti

Pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terkait pemeliharaan sarana prasarana dan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kondisi sebagian sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Padahal sarana prasarana yang baik dan terawat merupakan faktor pendukung utama bagi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD kepada anggota Dewan dapat terhambat jika sarana prasarananya rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perlu penanganan segera terhadap sarana yang rusak agar dapat berfungsi kembali sesuai standar. Selain itu, perlu peningkatan pengelolaan prasarana secara berkelanjutan melalui pemeliharaan rutin agar kualitas dan daya gunanya tetap terjaga.

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022

Ur90rrtu ioiou	Nama Barang	Kondisi	Jml	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PC Unit	Baik 34, RR 1, RB 19	54	
2	Laptop	Baik	13	
3	Note Book	Baik 7, RR 2	9	
4.	Hard Disk	Baik	1	
5.	Printer (Peralatan personel computer)	Baik 32, RB 9	41	
6.	Scanner (Peralatan personal computer)	Baik 1, RR 3	4	
7.	Camera elektronik	Baik	6	
8.	Video monitor	Rusak Ringan	1	
9.	Layar film/proyektor	Baik 21, RB 3	24	
10.	Telephone mobile	Baik 53, RR 1, RB 43	97	
11.	Facsimile	Baik	1	
12.	Peralatan Antena SHF/ Parabola Lain - lain	Baik	6	
13.	Receiver STL/SHF	Baik 12, RB 7	19	

Sumber: Penelitian Terdahulu

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/42422/30485>

Pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terkait pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD juga belum optimal dimana dalam realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD kabupaten Rembang. Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2022, anggaran yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baru tercapai sebesar 33,60 %, anggaran untuk layanan DPRD juga dikatakan kurang optimal karena baru tercapai sebesar 45,01 %, dan yang terakhir realisasi anggaran untuk melaksanakan pengawasasn kode etik DPRD tidak terealisasi sama sekali.

**Tabel 1.6 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Tahun 2022**

No.	Nama Kegiatan	Anggar Setelah Perubahan	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.019.177.000	31.924.454.746	96,68
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.370.000	24.985.000	33,60
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.501.801.000	4.414.795.559	98,07
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	874.502.000	705.902.559	80,72
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.334.000	574.791.908	88,11
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.806.000	397.843.601	89,44
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	859.325.000	665.222.825	77,41
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.060.667.000	941.823.345	88,80
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.348.672.000	24.107.854.949	99,01
9.	Layanan Administrasi DPRD	202.700.000	91.235.000	45,01
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
1.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.468.025.000	1.179.725.984	80,36
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	448.086.000	327.624.675	73,12

3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	463.278.000	430.012.881	92,82
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.415.268.000	2.727.278.656	79,86
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.379.534.000	3.961.108.175	90,45
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	35.045.000	0	0,0
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	14.640.574.000	13.267.906.416	90,62
	Jumlah	57.833.942.000	53.818.111.533	93,06

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2024

Selanjutnya terkait tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD untuk membantu pelayanan administrasi DPRD masih belum optimal. Belum optimalnya efisiensi penggunaan sumberdaya Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2023. Pada tabel dibawah efisiensi penggunaan sumberdaya untuk Jumlah bintek ASN baru terealisasi 80% dari taerget sebesar 96%, jika dibandingkan dengan data tahun 2022 maka efisiensi penggunaan sumberdaya mengalami penurunan dimana tahun 2022 efisiensi penggunaan sumberdaya terealisasi sebesar 100%.

Tabel 1.7 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022 dan 2023

No	Tujuan/Sasaran	Tahun 2022			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Pengelolaan keuangan	80%	80%	100%	96%	96%	100%
2.	Jumlah bintek ASN	100%	100%	100%	96%	80%	83%
3.	Tercukupinya perlengkapan kantor	90%	90%	100%	96%	80%	83%

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Dengan permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD perlu adanya solusi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sejalan dengan itu Agus Dwiyanto (2017:50-51) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mendukung atau menghambat kinerja, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, dari pendapat Meoheriono (2012:95) bahwa sasaran, tujuan, serta visi dan misi dari organisasi juga dapat berfungsi sebagai faktor pendukung kinerja. Dengan menetapkan sasaran yang jelas dan realistis, serta visi dan misi yang inspiratif, organisasi dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Sesuai dengan kondisi dilapangan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja Bagian Umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah produktivitas dan akuntabilitas. Produktivitas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah hasil kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bagian Umum dan keuangan di Tahun 2023. Sedangkan akuntabilitas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah suatu kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum dan

Keuangan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara transparan dan terukur kepada anggota DPRD kabupaten Rembang.

Peningkatan produktivitas dan akuntabilitas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat menjadi solusi atas persoalan yang ada terkait pelaksanaan tugas pengembangan SDM, pemeliharaan sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran sekretariat dan DPRD. Hal ini karena produktivitas dan akuntabilitas yang tinggi di Bagian Umum dan Keuangan berhubungan erat dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran, penggunaan sumber daya yang efektif, serta pemeliharaan sarana prasarana yang memadai. Ketiga aspek tersebut sangat mempengaruhi kinerja Bagian Umum dan Keuangan sehingga hasil kerja dan layanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan. Dengan demikian, perlu adanya upaya peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kerja di Bagian Umum dan Keuangan, melalui penerapan sistem manajemen yang ketat dan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap pelaksanaan aktivitas. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi dalam mendukung roda pemerintahan daerah.

Sejalan dengan permasalahan terkait kinerja dari Bagian Umum dan Kuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang menjadi penunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini juga didukung oleh data-data pada laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana **“Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disusun oleh penulis, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Pada pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terkait pengembangan SDM aparatur sipil negara terdapat persoalan jenjang Pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang masih didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat.
2. Pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terkait pemeliharaan sarana prasarana dan rumah tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kondisi sebagian sarana dan prasarana yang banyak mengalami kerusakan.
3. Pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang terkait pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD belum berjalan dengan baik dimana dalam realisasi anggaran dan efektifitas penggunaan anggaran pada Sekretariat DPRD kabupaten Rembang masih terdapat capaian anggaran yang masih dibawah 70%.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah sistematis dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada kajian teori yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unoiversitas Diponegoro.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

1. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

2. Hasilnya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta bermanfaat untuk dapat mengetahui Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1.5.3 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan tentang Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan ASN dan organisasi itu sendiri

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menggunakan ringkasan dari artikel sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi judul penelitian, peneliti, sumber jurnal, tujuan penelitian, dan perbedaan penelitian yang sudah diteliti dengan yang akan diteliti. Berikut Tabel 1.5 dengan hasil tabel ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Temuan	Perbedaan
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR	Peneliti: Widy Seftia Nur, Dine Meigawati, Rizki Hegia Sampurna Jurnal: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 2 (2020)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.	Penelitian ini membahas terkait kualitas sumberdaya yang mendai faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur
STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TARGET KINERJA SUMBER DAYA APARATUR DISEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG	Penulis: Hania Rosa Amalia, Siti Sumiati Jurnal: JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG (2022) ISSN: 2963-2730	Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis Kualitas Pelayanan dan Target Kinerja Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Rembang Kabupaten, untuk menguraikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Sekretariat untuk	Hasil dari penelitian ini adalah kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang secara umum sudah optimal. Kendala yang dihadapi berupa staf ASN yang kurang memadai sumber daya, dan adanya	Penelitian ini membahas tentang kualitas layanan dan target kinerja para pegawai atau sumber daya aparatur dalam meningkatkan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten rembang

		meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD.	diskomunikasi, fasilitas yang tidak memadai.	
KINERJA SEKRETERIAT DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA	Peneliti: AGLANOVIAN A W. NOYA, FEMMY M.G TULUSAN, DEISY L. TAMPONGANG OY Jurnal: JAP No. 107 Vol. VII (2021) ISSN 2338 – 9613	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif, efisien, adil, dan responsif dalam memberikan layanan kepada seluruh anggota DPRD. Namun, layanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan seluruh staf dan pegawai, serta berlaku adil dalam memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan kelompok tertentu. Selain itu, perlu juga mempermudah proses dan prosedur administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.	Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan Sekretariat kepada seluruh anggota DPRD melalui indikasi kelemahan kualitas ataupun kompetensi SDM yang kurang profesional

UPAYA PENINGK ATAN KINERJA LAYANAN SEKRETA RIAT DPRD KABUPAT EN SOPPENG	Peneliti: Anirwan, Aswar Annas Jurnal: Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Volume: 2, Nomor: 2, (2020) ISSN (online): 2684-9992	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan agar bisa mencapai penilaian sangat baik.	Penelitian ini membahas bagaimana upaya dalam meningkatkan kinerja layanan sekretariat DPRD kabupaten Soppeng melalui penyediaan media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja- kerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas
IMPLEME NTASI KEBIJAKA N CORE VALUES DAN EMPLOYE R BRANDIN G APARATU R SIPIL NEGARA BERDASA RKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYA	Penulis: Athaya Arla Arthania, Herbasuki Nurcahyanto, Sri Suwitri Jurnal: E-Journal Undip (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Core Values dan Employer Branding bagi aparatur sipil negara berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Nilai Inti ASN dan kebijakan Employer Branding sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya dampak terhadap organisasi, perubahan dan penerimaan oleh organisasi. Namun masih terhambat oleh kompetensi pegawai, sarana	Penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan core values dan employer branding di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang didasarkan pada surat edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur

GUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2021 DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG		Nomor 20 Tahun 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang serta faktor pendukung dan penghambatnya.	prasarana, sistem anggaran dan disiplin pegawai yang belum optimal. Peneliti memberikan rekomendasi bagi Sekretariat DPRD agar melakukan pembenahan terhadap Seluruh ASN, sarana prasarana, sistem anggaran dan penguatan aturan kerja.	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021
The Role of Employees of the DPRD Secretariat in Serving and Supporting the Implementation of Duties and Functions of the DPRD in East Kutai District	Penulis: Zubair Arifin, Praptining Sukowati, Tommy Hariyant Jurnal: International Conference In Social Science (2020)	penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pejabat eselon Sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016.	penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pejabat eselon Sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 belum maksimal. Pejabat eselon Sekretariat DPRD berperan dominan berperan sebagai “fasilitator” kegiatan DPRD. Sedangkan peran	Penelitian ini membahas tentang peran Pejabat Eselon Sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kutai Timur

			“koordinator” program kegiatan DPRD bersama daerah pemerintah; dan peran “administrator” dalam perumusan rancangan kebijakan daerah dan pelaporan hasilnya pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD belum terlaksana dengan baik.	
The Role of the Council Secretariat in Supporting DPRD Performance Central Bengkulu Regency for the 2019 - 2024 period	Penulis: Trionsory, Ardilafiza, Achmad Aminudin Jurnal: INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND PUBLIC ADMINISTRATI ON Vol. 5. No. 1 (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sekretariat Dewan dalam mendukung kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah	Di dalam penelitian ini pada aspek efektivitas terdapat kelemahan yaitu terkait dengan kurangnya peralatan untuk mendukung kinerja anggota dewan, seperti laptop. Selain itu, pengelolaan informasi media seperti website resmi DPRD masih belum optimal dan penggunaan teknologi informasi masih minim. Dan juga teknis kegiatan bimbingan jarang dilakukan untuk staf, dan teknis pembinaan masih	Penelitian ini membahas bagaimana peran Sekretariat Dewan dalam mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengan dari berbagai aspek.

			belum optimal bagi anggota dewan dalam hal materi bimbingan teknis. Untuk aspek efisiensi, kelemahannya yang terjadi adalah minimnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga penyediaan infrastruktur teknologi masih belum tersedia. Dan pada aspek peran strategis, kelemahan yang terjadi adalah kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi staf sekretariat dan minimnya penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kinerja dari anggota dewan.	
PERFORMANCE OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL SECRETARIAT	Penulis: Leonie Agustina, Samahuddin Muharam, Jamaluddin Jurnal: International Journal of Political, Law,	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai dan faktor-faktor yang berperan	Hasil menunjukkan bahwa aspek kualitas kerja, inisiatif belum menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan aspek ketepatan waktu, kemampuan dan	Penelitian ini membahas tentang kinerja aparatur sekretariat DPRD yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk

APPARAT US MURUNG RAYA DISTRICT	and Social Science Vol. 4. No. 1. (2023) ISSN: 2501-7322	terhadap kinerja aparatus sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya.	komunikasi telah menunjukkan kinerja yang baik. Faktor kemampuan sebagai salah satu faktornya yang berperan dalam kinerja menunjukkan kinerja yang baik.	juga kinerja para pegawainya
---	--	--	--	------------------------------------

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitian yang dapat menjadi fokus dari penelitian selanjutnya. Penelitian ini terkait Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Penelitian terdahulu hanya membahas tentang strategi dalam meningkatkan kualitas layanan dan target kinerja sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bukan pada kinerja bagian umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Pada tinjauan Pustaka ini beberapa artikel terkait kinerja birokrasi, kinerja aparatur, dan kinerja organisasi terkait Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan.

Widy Seftia Nur et. Al. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam penelitiannya juga menjelaskan terkait fenomena masalah yang terjadi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur yaitu masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang ditepati dan adanya ketidak seimbangan antara jumlah

pegawai dengan beban kerja yang ada. Penelitian terkait sumberdaya manusia dalam kinerja organisasi juga dilakukan oleh Aglanoviana W. Noya et. Al (2021), Kinerja Sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup efektif, efisien, adil, dan responsif dalam melayani seluruh anggota DPRD. Namun, layanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan seluruh staf dan pegawai di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Hania Rosa Amalia et. Al (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan dari tugas DPRD Kabupaten Rembang secara umum sudah baik dan optimal namun kendala staf ASN yang kurang memadai dan adanya diskomunikasi, fasilitas yang tidak memadai menjadi kendala utama. Penelitian terkait permasalahan fasilitas pada kantor Sekretariat DPRD juga dilakukan oleh Trionsory, Ardilafiza et. Al (2024) menjelaskan bahwa pada aspek efektivitas terdapat kelemahan yaitu kurangnya peralatan untuk mendukung kinerja anggota dewan, seperti laptop.

Aswar Annas et. Al (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap perlu untuk dilakukan peningkatan layanan.

Penelitian terkait implementasi kebijakan core values dan dan employer branding yang dilakukan oleh Athaya Arla Arthania et. Al (2023) menunjukkan bahwa penerapan Nilai Inti ASN dan kebijakan Employer Branding di Sekretariat

DPRD Kabupaten Rembang sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya dampak terhadap organisasi, perubahan dan penerimaan oleh organisasi. Namun masih terhambat oleh kompetensi pegawai, sarana prasarana, sistem anggaran dan disiplin pegawai yang belum optimal. Peneliti memberikan rekomendasi bagi Sekretariat DPRD agar melakukan pembenahan terhadap Seluruh ASN, sarana prasarana, sistem anggaran dan penguatan aturan kerja. Arifin et. Al (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran pejabat eselon Sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Kutai Timur belum maksimal, peran coordinator program kegiatan DPRD dan peran Administrator dalam perumusan kebijakan daerah dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD juga belum terlaksana dengan baik

Agustina et. Al dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aspek kualitas kerja, inisiatif dari pegawai Sekretariat DPRD menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan aspek ketepatan waktu, kemampuan, dan komunikasi juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Faktor kemampuan sebagai salah satu faktor yang berperan dalam menunjukkan kinerja yang baik.

1.6.2 Kajian Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

David H. Rosenbloom (dalam Harbani, 2010:7) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah penerapan berbagai konsep manajemen, politik, dan hukum guna memenuhi sasaran pemerintah di level legislatif dan eksekutif. Sasaran tersebut meliputi pelaksanaan fungsi pengaturan dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dan sebagian. Untuk mencapai

tujuan tersebut, para pelaku administrasi publik harus memahami berbagai dinamika yang terjadi di bidang politik maupun hukum. Selain itu, penerapan teori-teori manajemen yang relevan dengan kondisi diperlukan. Sebab, administrasi publik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai unsur. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan mendalam mengenai berbagai aspek terkait yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi publik agar sasaran pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, administrasi publik merupakan suatu sistem integral yang erat kaitannya dengan unsur politik, hukum, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen yang tepat guna.

Menurut Dwight Waldo, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses manajemen dan pengorganisasian sumber daya manusia serta peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Syafiie, 2010:24). Proses administrasi publik melibatkan berbagai elemen, termasuk koordinasi antar berbagai lembaga, komunikasi yang efektif, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam menjalankan fungsinya, para administrator publik perlu memiliki keterampilan manajerial yang kuat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul di masyarakat.

Woodrow Wilson (1887) menyoroti signifikansi pemisahan antara politik dan administrasi. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal dalam sektor publik, administrasi harus dikelola dengan cara yang efisien dan profesional. Menurutnya, pemisahan ini penting agar keputusan

administratif tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas publik yang lebih efektif

1.6.2.2 Manajemen Publik

Menurut pendapat Ramto (1997:14) bahwa manajemen publik adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik yang mendukung tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri dengan sumber daya yang ada pada organisasi.

Menurut penjelasan Nor Ghofur (2014), manajemen publik merupakan manajemen yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Manajemen publik tidak hanya terfokus pada aspek administrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk memenuhi kepentingan publik. Manajemen publik berkaitan dengan berbagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian layanan secara menyeluruh.

Nor Ghofur (2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa manajemen publik bertujuan untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki, meningkatkan kinerja organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Manajemen publik juga mencakup pengorganisasian, perencanaan, evaluasi, dan pengendalian agar seluruh aspek operasional berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan masyarakat yang berkualitas dengan memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Dengan kata lain, manajemen

publik ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

1.6.2.3 Kinerja

Dwight Waldo (1984) menjelaskan kinerja dalam administrasi publik, dimana administrasi publik perlu memiliki kemampuan untuk mengelola kinerja secara efektif agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia berargumen bahwa keberhasilan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh cara di mana kinerja dikelola dan diukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi publik selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Selain itu, Dwight Waldo (1984) mencatat bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya.

Wittaker (1997) mendefinisikan kinerja sebagai suatu alat ukur dalam manajemen yang berfungsi untuk menilai sejauh mana seseorang dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Kinerja tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga mencakup proses, upaya, dan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kinerja dapat dianggap sebagai indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas individu atau tim dalam organisasi. Penilaian kinerja ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Agus Dwiyanto (2017:50-51) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja atau tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, yaitu output, efisiensi, dan efektivitas. Konsep kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul Reformasi birokrasi Di Indonesia sendiri menjelaskan tentang penilaian kinerja yaitu suatu kegiatan dimana kegiatan ini dinilai penting karena bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi agar tercapai misi organisasi tersebut.

Moeheriono (2012:95) menjelaskan bahwa kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan, sasaran, visi, dan misi sebuah organisasi. Kinerja ini tercermin melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pencapaian kinerja menunjukkan sejauh mana organisasi berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program, rencana, dan kegiatan organisasi. Kinerja yang baik akan membuka peluang organisasi untuk terus bertumbuh dan berkembang guna mencapai visi masa depan secara berkelanjutan. Menjaga dan meningkatkan kinerja merupakan keniscayaan organisasi untuk dapat tetap selangkah lebih maju dan memuaskan berbagai pemangku kepentingan seiring perkembangan zaman. Dengan kata lain,

kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi mewujudkan tujuan dan sasarannya.

1.6.2.4 Faktor Pndukung dan Penghambat Kinerja

Menurut Agus Dwiyanto (2017:50-51) dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, terdapat indikator-indikator yang dapat mendukung atau menghambat kinerja, yaitu:

1. Produktivitas: Dwiyanto (2017:50) menjelaskan bahwa produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga aktivitas pelayanan. Umumnya, produktivitas dipahami sebagai rasio antara output dan input. Namun, konsep ini dianggap sempit, sehingga General Accounting Office (GAO) mengembangkan ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan hasil yang diharapkan dari pelayanan publik sebagai indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan: Kualitas layanan menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dapat menciptakan pandangan negatif terhadap organisasi publik. Menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja memiliki keuntungan, karena informasi tentang kepuasan seringkali mudah dan murah diperoleh, baik melalui media massa maupun diskusi publik. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat bisa dijadikan parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas: Responsivitas merujuk pada kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program layanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dwiyanto (2017:51) menyatakan bahwa responsivitas yang rendah terlihat dari ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat, yang menunjukkan kegagalan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya. Responsivitas sangat penting dalam penilaian kinerja karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas: Responsibilitas mengacu pada pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku.
5. Akuntabilitas: Akuntabilitas publik merujuk pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik diawasi oleh pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsi dasar di sini adalah bahwa pejabat yang terpilih akan merepresentasikan kepentingan rakyat, sehingga akuntabilitas dapat digunakan untuk menilai konsistensi kebijakan dan kegiatan organisasi publik dengan kehendak masyarakat.

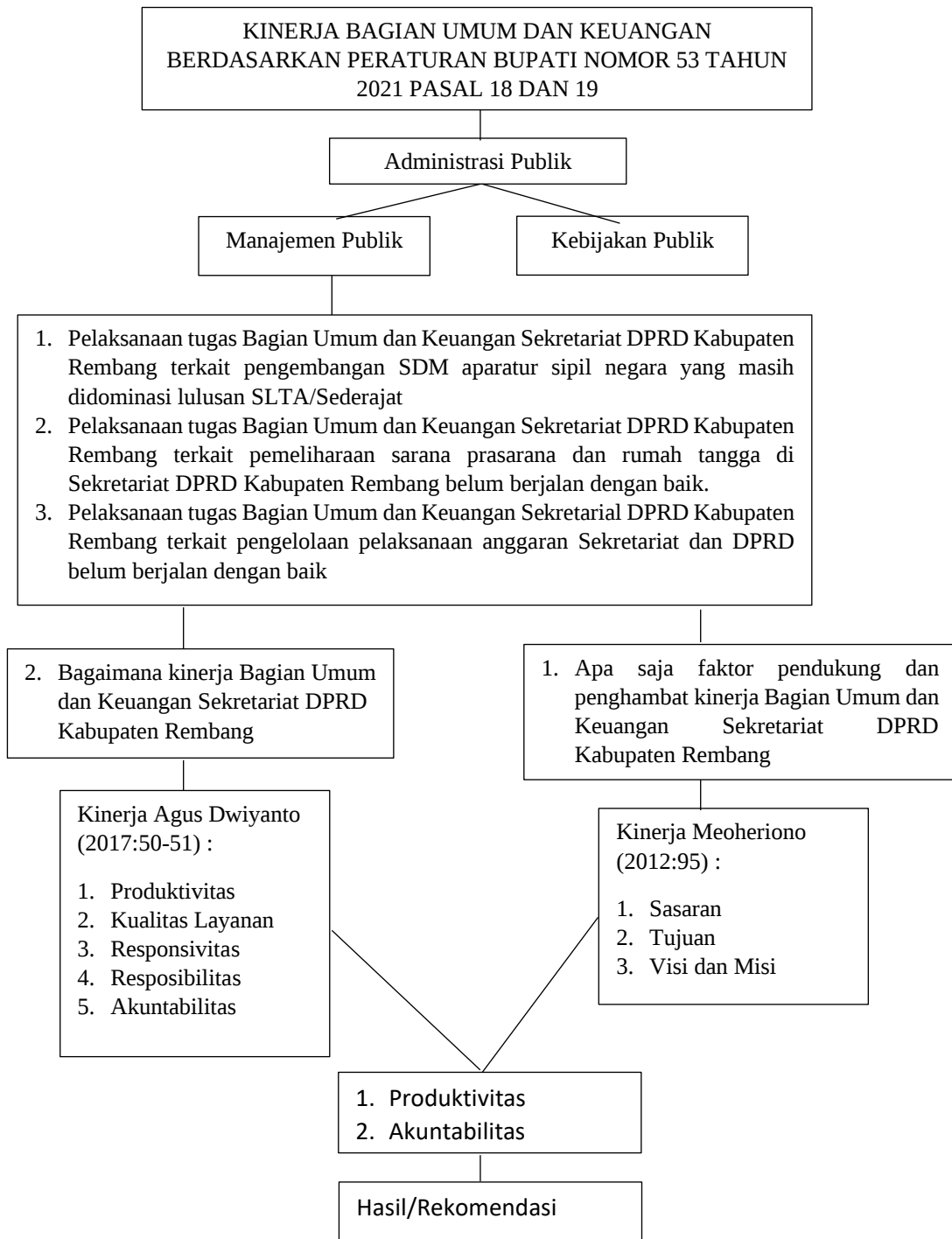
Dari pendapat Moeheriono (2012:95) yang menjelaskan bahwa kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan, sasaran, visi, dan misi sebuah organisasi. Dengan kata lain, indikator-indikator seperti sasaran, tujuan, visi, dan misi yang

jelas menjadi acuan bagi organisasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Apabila sasaran, tujuan, visi, dan misi ditetapkan dengan jelas dan masuk akal melalui perencanaan strategis yang matang, hal itu akan memberikan arah dan panduan bagi organisasi untuk menyiapkan berbagai kebijakan, program, serta rencana kerja sehingga hasil kinerjanya dapat terukur secara obyektif.

1.6.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian Analisis Penilaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah dari Agus Dwiyanto (2017:50-51) dan Meoheriono (2012:95)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Kinerja Bagian Umum Dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah kerja yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan Pasal 19. Kinerja yang baik dari Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dalam memberikan layanan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Tabel 1.9 Operasional Konsep

Konsep	Fenomena	Gejala
1. Kinerja Bagian Umum Dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah kerja yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 18 dan Pasal 19	1. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum dan Keuangan	1.1.1 Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara 1.1.2 Pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga 1.1.3 Pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD
	1.1 Tugas	
	1.2 Fungsi	1.2.1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 1.2.2 Pelaksanaan bidang tata usaha

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum dan Keuangan 2.1 Produktivitas adalah hasil kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bagian Umum dan keuangan di Tahun 2023.	2. Faktor Pendukung dan Penghambnat Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2.1 Produktivitas	2.1.1 Program Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara 2.1.2 Perbaikan Kerusakan sarana perlengkapan dan rumah tang 2.1.3 Laporan Alokasi Anggaran Sekretariat dan DPRD 2.1.4 Bahan perumusan kebijakan teknis yang memadai 2.1.5 Program pembinaan bidang tata usaha
2.2 Akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Bagian Umum dan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara transparan dan terukur kepada anggota DPRD kabupaten kabupaten Rembang	2.2 Akuntabilitas	2.1.6 Pengawasan program pengembangan SDM 2.1.7 Evaluasi Program pemeliharaan sarana dan prasarana 2.1.8 Evaluasi realisasi anggaran 2.1.9 Pengawasan proses penyiapan bahan kebijakan teknis 2.1.10 Evaluasi pembinaan bidang tata usaha

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan terkait tugas Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tentang produktivitas dan akuntabilitas, menurut teori Agus Dwiyanto (2017:50-51) dan Meoheriono (2012:95) produktivitas dan akuntabilitas mampu menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Mengacu pada berbagai permasalahan yang ada di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, maka peneliti tertarik untuk memilih penelitian tentang "**Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang**", diharapkan penelitian ini dapat mengungkap bagaimana kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang melalui berbagai faktor pendukung dan penghambat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Menurut Mukhtar (2013), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pemahaman atau konsep terkait topik penelitian yang sedang diteliti pada saat tertentu. Tipe penelitian ini adalah kualitatif, dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1.9.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Al Muchtar, 2015).

Lokasi dari penelitian ini adalah pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Sementara situs penelitian ini adalah Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Tabel 1.10 Subjek Penelitian

No.	Subjek	Jumlah	Presentase	Total	Teknik
1	Sekretaris Dewan	1	10%	1	Purposive Sampling
2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1	10%	1	Purposive Sampling
3	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	10%	1	Purposive Sampling
4	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	1	10%	1	Purposive Sampling
5	Kepala Subbagian Keuangan	1	10%	1	Purposive Sampling
6	Staf Bagian Umum dan Keuangan	21	20%	4	Random Sampling

Subjek penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Random Sampling*. Data penelitian ini diperoleh dari subjek atau informan yang mengerti tentang Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti dapat memilih sampel secara terfokus dan tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya. Kriteria tersebut berguna untuk memilih sampel yang paling relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian.

1.9.4 Jenis Data

Peneliti memanfaatkan data yang berjenis kualitatif, yang dimana data ini terdiri informasi yang dikemukakan oleh para narasumber dalam menjelaskan Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

1.9.5 Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi secara langsung. Pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu para informan yang mengetahui tingkat kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Observasi dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD tepatnya di Jl. Jend. Sudirman No.83, Kutoharjo, Tasikagung, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.

Data sekunder yang didapatkan pada penelitian ini meliputi:

1. Dokumen LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
2. Artikel dan informasi jurnal di internet
3. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan kepada perwakilan pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai lokasi penelitian ini terkait kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Ketua Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Rembang atau yang mewakili pegawai Bagian Umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai shakeholder utama dalam penilaian kinerja. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi foto bersama dengan informan penelitian dalam pengumpulan data maupun dalam observasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

2. Observasi

Observasi penelitian dilaksanakan langsung dengan pengamatan kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan yang memungkinkan pengambilan data.

Hasil observasi menunjukkan kondisi sarana dan prasarana di Bagian Umum dan Keuangan dimana printer dan scanner mengalami kerusakan sebanyak 2 unit.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari, menganalisis dan memahami literatur dari dokumen, arsip – arsip dan laporan kinerja resmi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang serta artikel ataupun informasi dari jurnal. Pengumpulan data diproses menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penentuan narasumber berdasarkan pada tujuan dan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih adalah yang memahami permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mempermudah peneliti. Dokumen yang digunakan yaitu LKJIP, , artikel jurnal penelitian terdahulu, dan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang nomor 53 tahun 2021. Hasil dokumentasi menunjukkan pada alokasi anggaran ada beberapa yang masih belum mencapai

target anggaran seperti jumlah bimtek ASN, tercukupinya perlengkapan kantor, dan penambahan asset BMD.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2020), dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam (triangulasi), yang dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai kejenuhan. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data: Tujuan utama adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi ketiganya (triangulasi).
2. Kondensasi Data: Bertujuan untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah (seperti catatan lapangan atau transkrip wawancara) menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna. Proses ini dilakukan untuk membuat data yang besar dan kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan tujuan penelitian.
- Penyajian Data: Menyajikan data agar mudah dipahami dan dihubungkan dengan hal lain dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat berupa tabel, uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya, tetapi biasanya menggunakan teks naratif untuk menyajikan data.

3. Penarikan Kesimpulan: Merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, atau berupa hubungan kausal atau interaktif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak selalu harus menjawab rumusan masalah awal, karena masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan bisa berkembang selama penelitian di lapangan.

Analisis dan interpretasi data adalah langkah untuk mengolah data penelitian menjadi data yang dapat digunakan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan, termasuk penilaian Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1.9.8 Kualitas Data

Lincoln dan Guba (1985) menjelaskan bahwa *peer debriefing* merupakan suatu proses di mana peneliti terlibat dalam diskusi dengan rekan sejawat guna memperoleh umpan balik yang konstruktif terkait analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Diskusi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai validitas temuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi bias yang mungkin memengaruhi hasil penelitian.

Pengujian validasi data pada penelitian ini menggunakan metode *peer debriefing*, validasi data dilakukan dengan cara peneliti memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dengan pihak yang mengetahui tingkat kinerja Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten

Rembang, selain para informan. Misalnya peneliti melakukan validasi kembali dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang. Tujuan penerapan validasi data dengan metode *peer debriefing* ini agar data-data yang telah didapat dari hasil wawancara maupun observasi di lapangan dapat diverifikasi kembali dan diperoleh opini serta masukan dari sumber informasi lain. Dengan demikian, diharapkan hasil temuan penelitian sudah tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Peer debriefing* ini berguna juga bagi peneliti untuk menilai kembali proses yang telah dilalui dan data-data yang terkumpul, sehingga kualitas penelitian menjadi lebih terjamin.